
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (TINJAUAN LITERATUR REVIEW)

Muhammad Zakki Syafi'i¹⁾, Sri Rohyanti Zulaikha²⁾

Email: zakkisyafii@gmail.com

²⁾Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁾Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pengembangan koleksi diterapkan di perpustakaan perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tinjauan literatur. Dasar penilaian penelitian ini adalah artikel yang ditampilkan secara keseluruhan yang terkait dengan kebijakan pengembangan koleksi dan jurnal dalam bidang perpustakaan dan kearsipan dari tahun 2020 hingga 2022. Penelusuran dilakukan terhadap database Google Scholar yang diakses dengan alamat web <https://scholar.google.com>. Menggunakan pencarian lanjutan, kata kunci yang dipilih adalah penelitian kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan perguruan tinggi dan mulai tanggal/tahun 2020-2022, kemudian hasil penelusuran yang muncul berjumlah 90 artikel. Selanjutnya peneliti melakukan penyaringan untuk menyesuaikan kriteria sehingga dihasilkan 40 artikel, kemudian peneliti mengkaji lebih mendalam (pengkajian kualitas) yang relevan dengan tujuan penelitian dihasilkan 5 artikel. Langkah selanjutnya, artikel tersebut dianalisis dengan pengambilan data berdasarkan data-data penting dalam artikel yaitu nama penulis, tahun terbit, judul, jurnal, tujuan, metode dan hasil penelitian. Hasil penelitian yang ditunjukkan adalah implementasi pengembangan koleksi mendapatkan kendala, yang sering atau umum terjadi yaitu mengenai masalah anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja. Perpustakaan belum memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan perpustakaan. Akibatnya, tidak mungkin untuk kontekstualisasi kebijakan pengembangan koleksi. Selain itu, peneliti mendapatkan bahwa partisipasi pemakai dalam kebijakan pengembangan koleksi masih rendah. Namun, guna melengkapi persyaratan data pemakai yang benar, keharusan pustakawan untuk mengetahui apa yang sangat mereka butuhkan.

Keywords: Pengembangan koleksi, Perpustakaan perguruan tinggi, Kebijakan.

Abstract

The aim of this research is to evaluate how collection development policies are implemented in university libraries. This research is qualitative research with a literature review. The basis for assessing this research is the articles presented in their entirety related to collection and journal development policies in the field of libraries and archives from 2020 to 2022. The search was carried out on the Google Scholar database which was accessed at the web address <https://scholar.google.com>. Using advanced search, the keywords chosen were research on policies for developing university library collections and starting from 2020-2022, then the search results that emerged totaled 90 articles. Next, the researchers carried out filtering to adjust the criteria so that 40 articles were produced, then the researchers studied in more depth (quality assessment) which were relevant to the research objectives, resulting in 5 articles. The next step, the article

is analyzed by collecting data based on important data in the article, namely the author's name, year of publication, title, journal, objectives, methods and research results. The results of the research shown are that the implementation of collection development encounters obstacles, which often or commonly occur, namely regarding budget, facilities and labor issues. Libraries do not yet have full autonomy in library management. As a result, it is not possible to contextualize collection development policies. Apart from that, researchers found that user participation in collection development policies is still low. However, in order to complete user data requirements correctly, librarians must know what they really need.

Keywords: *Collection development, College library, Policy*

PENDAHULUAN

Perpustakaan adalah tempat guna menyimpan, mengumpulkan dan menyampaikan informasi, mengelolanya dengan cara yang khusus. Perpustakaan memiliki kewajiban guna melakukan perubahan dengan penyesuaian terhadap kemajuan teknologi dan informasi berimplikasi kepada kebutuhan informasi yang dimiliki oleh setiap pengguna. Untuk memperkaya koleksi perpustakaan yang seimbang dan baik, perpustakaan perguruan tinggi merencanakan dan melakukan pemilihan sumber informasi yang tepat sasaran agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna era sekarang hingga era selanjutnya, kegiatan tersebut dikenal dengan kegiatan pengembangan koleksi. Untuk memastikan bahwa koleksi perpustakaan selalu memenuhi kebutuhan pembaca dan memiliki jumlah bahan yang mencukupi, proses pengembangan koleksi dimulai. Kegiatan pengembangan koleksi memerlukan sebuah acuan yang dikenal dengan sebutan kebijakan pengembangan koleksi, semua perpustakaan memerlukan suatu kebijakan dalam pengembangan koleksi, termasuk perpustakaan di lingkungan universitas memerlukan kebijakan dalam pengembangan koleksi guna menentukan arah yang jelas dan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Kegiatan pengembangan koleksi masih kurang mendapatkan perhatian di perpustakaan, sedangkan dalam pelaksanaannya pengembangan koleksi ialah sejumlah kegiatan pengembangan bahan pustaka yang seluruh kegiatannya diberikan kepada kebijakan dari kepala perpustakaan dan pustakawan (Rahmah, 2014). Sebuah perpustakaan memiliki kewajiban untuk mempunyai pernyataan tertulis yang disebut kebijakan pengembangan koleksi. Penting untuk memiliki kebijakan pengembangan tertulis di sebuah perpustakaan, karena jika tidak ada kebijakan pengembangan koleksi diibaratkan seseorang mau memulai suatu bisnis akan tetapi tanpa melakukan perencanaan bisnis terlebih dahulu. Kebijakan pengembangan koleksi adalah alat yang digunakan untuk merencanakan dan mengkomunikasikan tujuan koleksi serta cara melakukannya (Yulinar, 2019).

Pustakawan menghadapi banyak tantangan saat menerapkan pengembangan koleksi. Salah satunya adalah pemahaman mereka bahwa pengembangan koleksi bersifat dinamis bertentangan pada yang terjadi di lapangan. Faktor yang menjadi sebab ialah kekurangan kolaborasi antara pengguna dan pustakawan. Ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam pengembangan koleksi yaitu analisis kebutuhan pengguna belum dilaksanakan secara menyeluruh. Tidak seperti kebutuhan pengguna yang sebenarnya, kebutuhan koleksi hanya dapat diukur melalui usulan judul buku (Gunawan, 2017). Pengembangan koleksi menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk anggaran yang tidak menentu untuk menambah dan memelihara koleksi, peletakan koleksi yang tidak sesuai, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan perpustakaan dan pusat informasi.

Pengguna dapat menjadi lebih puas dengan kebijakan pengembangan koleksi yang baik, yang mencakup pengetahuan yang cukup tentang kebijakan, ketersediaan sumber informasi, dan evaluasi kebijakan. Pemahaman pustakawan bahwa pengembangan koleksi adalah proses yang selalu berubah bertentangan dengan yang terjadi di lapangan. Penyebabnya ialah minusnya kolaborasi antara pengguna dengan pustakawan. Akibatnya, belum ada penelitian menyeluruh tentang kebutuhan pengguna sebagai fokus utama dalam pengembangan koleksi. Tidak seperti kebutuhan pengguna yang sebenarnya, kebutuhan koleksi hanya dapat diukur melalui usulan judul buku (Grataridarga, 2019). Masalah yang sering terjadi dalam pengembangan koleksi adalah anggaran yang tidak mencukupi untuk menambah dan memelihara koleksi, penerapan koleksi yang masih kurang memadai, dan kurangnya fasilitas guna berkelanjutan operasi pusat informasi dan perpustakaan (Gunawan, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini akan mengkaji publikasi sebelumnya tentang kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan perguruan tinggi.

KAJIAN PUSTAKA / TEORITIS

1. Pengembangan Koleksi

Pengembangan koleksi menurut ALA Glossary of Library and Information Science (1983), terdiri dari beberapa tindakan, termasuk menentukan dan mengkoordinasikan kebijakan seleksi, menilai kebutuhan pemakai, melakukan penelitian tentang penggunaan koleksi, mengevaluasi penggunaan koleksi, menemukan keperluan koleksi, merencanakan pemeliharaan bahan pustaka, memilih koleksi, dan merencanakan kerja sama sumber daya koleksi perpustakaan. Sulisty Basuki (1991) menyatakan bahwa pengembangan koleksi lebih menekankan terhadap seleksi koleksi, ini berarti memilih buku untuk perpustakaan (Yulinar, 2019).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bisa dikatakan bahwa pengembangan koleksi adalah kumpulan kegiatan untuk merencanakan, menentukan, mengkoordinasikan, menemukan, memilih dan melaksanakan pemeliharaan koleksi guna memenuhi kebutuhan informasi yang dimiliki setiap individu.

Tujuan pengembangan koleksi adalah sebagai berikut: a) Memprhatikan supaya koleksi perpustakaan tetap seimbang terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi; b) Memberikan koleksi perpustakaan yang tepat di kala pengguna membutuhkannya; c) Menjadi perbandingan dalam menetapkan kebijakan pengembangan koleksi; d) Masyarakat umum bisa langsung mengakses menggunakan internet; e) Meningkatkan akses pemustaka dan pustakawan; dan f) Memberikan informasi perkembangannya (Yulinar, 2019).

Menurut Edward G. Evans, ahli perpustakaan, tahap pengembangan koleksi adalah sebagai berikut:

- a. Analisis masyarakat adalah tahap pertama dari proses pengembangan koleksi guna menentukan siapa segmentasi perpustakaan. Faktor tingkat pendidikan, social, ekonomi, sosial dan budaya, umur, gender, dan minat baca, pemakai perpustakaan adalah faktor utama yang mempengaruhi koleksi perpustakaan.
- b. Kebijakan pengembangan koleksi, yang mencakup rencana perpustakaan guna menetapkan jenis koleksi perpustakaan dan mengembangkan koleksi data.
- c. Seleksi, yang pada dasarnya ialah menetapkan bahan pustaka yang seperti apa dan mana saja yang tepat dengan jenis koleksi perpustakaan.
- d. Pengadaan bahan pustaka mengacu pada kegiatan pengadaan bahan pustaka ke perpustakaan, seperti tukar-menukar, hibah, pembelian, titipan, dan penerbitan sendiri.
- e. Penyiangan adalah proses menyiangi dokumen yang rusak. Ketinggalan zaman dilarang oleh pemerintah dan disimpan di rak koleksi sampai diambil jika

diperlukan.

- f. Evaluasi, yaitu kegiatan mengevaluasi koleksi perpustakaan secara keseluruhan dan menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan untuk merencanakan perbaikan berikutnya (Ardyawin, 2020).

2. Kebijakan Pengembangan Koleksi

Bahan perpustakaan yang baik juga merupakan dasar dari koleksi yang baik. Untuk mencapai hal ini, kebijakan yang mengarahkan pengembangan koleksi diperlukan. Dengan menyusun kebijakan pengembangan koleksi yang mendapatkan pengesahan resmi dari pimpinan, perpustakaan akan memiliki pedoman yang kuat dalam pengembangan koleksinya. Ini tidak hanya memberikan otoritas resmi kepada perpustakaan, tetapi juga memungkinkannya membangun hubungan dengan pihak lain, baik di luar maupun di dalam lingkungannya. Koleksi harus terus didasarkan pada dasar yang kuat. Perpustakaan diharuskan mempertahankan koleksi yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan peneliti, dosen, dan mahasiswa. Demikian pula, persyaratan kurikulum harus dipertimbangkan. Pustakawan dapat menggunakan kebijakan pengembangan koleksi sebagai referensi saat mereka memilih bahan perpustakaan. Hal tersebut bertujuan supaya perpustakaan mempunyai bahan pustaka yang mendorong untuk tercapainya apa yang menjadi visi dan misi perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi dapat digunakan oleh pustakawan sebagai garis besar, petunjuk, dan pedoman untuk menambah dan menyangi koleksi mereka (Yulinar, 2019).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan koleksi ialah aturan tertulis yang mengatur pengembangan koleksi perpustakaan yang dimanfaatkan oleh pustakawan sebagai pedoman dalam memilih bahan perpustakaan dan digunakan juga oleh staf sebagai pedoman dalam memilih, mengadakan, dan mengevaluasi bahan perpustakaan.

Menurut Qalyubi (2007), ada tiga tahapan dalam penyusunan kebijakan pengembangan koleksi: a) Menemukan kebutuhan pemustaka sesuai dengan asasnya dan memanfaatkannya untuk membuat kebijakan umum pengembangan koleksi. Yayasan membentuk tim yang akan merancang kebijakan ini yang terdiri dari sekolah, perpustakaan, dan lembaga lain. b) Menentukan hak, tanggung jawab, dan tugas masing-masing lembaga yang ikut pada pengembangan. c) Menentukan kebutuhan informasi setiap anggota civitas akademika. d) Mengadakan dan memilih bahan pustaka melalui hadiah, penerbitan, pembelian, dan pertukaran. e) Memelihara bahan pustaka, f) Penyiangan bahan dan g) Evaluasi bahan (Yulinar, 2019).

Penelitian ini dimulai dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang relevan sebagai dasar dalam penulisan. Penelitian tentang kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan perguruan tinggi pernah dituliskan oleh Jasmine Anindita Putri dengan judul "Implementasi Kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia dalam Pengembangan Koleksi Elektronik". Yang menjadi temuan dari penelitian ini ialah perpustakaan terkait sudah melaksanakan 5 dari 6 langkah pengembangan koleksi elektroniknya, termasuk analisis pengguna, kebijakan seleksi, seleksi, pengadaan, dan evaluasi. Namun, anggaran yang menurun yang dirasakan oleh perpustakaan telah mempengaruhi kegiatan pengembangan koleksi elektronik, terutama dalam seleksi dan pengadaan. Selain itu juga dampak wabah mendorong prosedur yang dapat berubah dalam pengembangan koleksi elektronik, meskipun perubahan itu belum terdokumentasi secara tertulis (Putri & Gani, 2022). Artikel jurnal ini merinci bagaimana perpustakaan terkait sudah memproses 5 dari 6 tahap pengembangan koleksi elektroniknya yang terkait dengan pengembangan koleksi. Meski demikian, artikel ini belum secara menyeluruh menjelaskan aspek digital yang terlibat dalam konteks

pengembangan koleksi

Penelitian lain yang ditulis oleh Nihayati dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi”. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai hambatan dalam implementasi pengembangan koleksi, seperti ketidakrelevan, publikasi berlebihan, atau informasi ganda, anggaran yang terbatas, pengawasan bibliografi, kurangnya komunikasi, kesenjangan antara seleksi, ketiadaan kebijakan tertulis, analisis pengguna yang kurang, minimnya peran pihak yang berwenang dalam seleksi, dan kurangnya alat bantu seleksi. Pustakawan juga menghadapi kekurangan kepercayaan. Otonomi perpustakaan belum sepenuhnya terwujud, sehingga kontekstualisasi kebijakan pengembangan koleksi belum optimal. Temuan lainnya menunjukkan partisipasi pengguna dalam perencanaan kebijakan pengembangan koleksi terbatas (Nihayati, 2021). Penelitian ini menunjukkan secara komprehensif mengenai hambatan pengembangan koleksi di perpustakaan, namun berfokus pada koleksi tercetak saja.

Penelitian lain yang ditulis oleh Achmad Qorni Novianto dengan judul “Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan: Formulasi, Implementasi hingga Evaluasi”. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada (1) memperhatikan karakteristik serta kondisi spesifik perpustakaan, dan (2) konten kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai aspek. Evaluasi terhadap kebijakan pengembangan koleksi menjadi penting guna (1) merancang kembali kebijakan pengembangan koleksi yang akan diterapkan di masa depan, dan (2) mengevaluasi kinerja perpustakaan dalam menjalankan berbagai kegiatan pengembangan koleksi (Achmad, 2021). Penelitian ini fokus membahas formulasi, implementasi dan evaluasi di perpustakaan, namun kegiatan pengembangan lainnya belum dibahas secara lengkap.

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya maka dapat ditemukan kesamaan yaitu mengkaji mengenai pengembangan koleksi di perpustakaan. Lebih jauh lagi, tulisan ini berupaya memperbaiki penelitian sebelumnya, terutama dalam mengulas pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan, termasuk koleksi tercetak, digital, dan elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan perguruan tinggi merupakan penelitian deskriptif dengan literature review, deskriptif adalah metode yang menjelaskan suatu gambaran sebagaimana yang terjadi. Literatur review atau kajian pustaka sebagai deskripsi mengenai literatur rangkuman, ulasan, dan pemikiran penulis yang biasa ditemukan di buku ilmiah serta artikel jurnal yang berkaitan mengenai topik yang dibahas dalam membuat karangan atau tulisan ilmiah literatur review mempunyai urgensi, karena memunculkan ide dan pendekatan lain yang mungkin belum pernah terfikirkan oleh peneliti (Ridwan dkk., 2021).

Dasar penilaian penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah karya tulis ilmiah yang mulai tahun 2020-2022, yang ditampilkan fulltext, terkait dengan kebijakan pengembangan koleksi, dan jurnal dalam bidang perpustakaan dan kearsipan. Penelusuran dilakukan terhadap database Google Scholar yang diakses dengan alamat web <https://scholar.google.com>. Menggunakan pencarian lanjutan, kata kunci yang dipilih adalah penelitian kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan perguruan tinggi dan mulai tanggal/tahun 2020-2022, kemudian hasil penelusuran yang muncul berjumlah 90 artikel. Selanjutnya peneliti melakukan penyaringan untuk menyesuaikan kriteria sehingga dihasilkan 40 artikel, kemudian peneliti mengkaji lebih mendalam (pengkajian kualitas) yang relevan dengan tujuan penelitian dihasilkan 5 artikel. Langkah selanjutnya, artikel tersebut dianalisis dengan pengambilan data berdasarkan

data-data penting dalam artikel yaitu nama penulis, tahun terbit, judul, jurnal, tujuan, metode dan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ekstraksi data atau pengambilan data berdasarkan data-data penting dalam artikel dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan nama penulis, tahun terbit, judul, jurnal, tujuan, dan metode penelitian. Artikel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 5 artikel yang kemudian peneliti uraikan dalam bentuk tabel, berikut ini adalah uraian hasil ekstraksi data:

No	Penulis/Tahun	Judul	Jurnal	Tujuan	Metode
1	Kurniawan/2020	Kebijakan pengembangan koleksi e-resources di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Libria, Vol. 12, No. 1	Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis pemanfaatan e-resources kebijakan pengembangan koleksi.	Metode deskriptif.
2	Desi Setiyawati/2021	Implementasi kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan Stikes Muhammadiyah Gombong	Al - Ma'mun, Vol. 2 No. 1	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan koleksi dan kendala apa saja yang dihadapi.	Metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka.
3	Ach. Nizam Rifki & Verry Mardiyanto	Implementasi kebijakan dan proses pengembangan koleksi digital Perpustakaan Perguruan Tinggi Vokasi	TIK Ilmeu, Vol. 4, no. 2	Kajian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan proses dan hasil kebijakan koleksi digital.	Deskriptif kualitatif dengan studi kasus.
4	Dian Maisaroh/2022	Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan pada Perpustakaan IAIN Kerinci	Baitul'Ulum, Vol. 6 No. 2	Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui terkait kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan terkait.	Metode kualitatif deskriptif.

5	Misteriani Maria Jawa Koten & Putut Suharso/202 1	Upaya pengembangan koleksi <i>grey literature</i> di Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro	Anuva, Volume 5	Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui dan mengeksplorasi terkait kebijakan pengembangan koleksi abu-abu atau <i>grey literature</i> di perpustakaan terkait.	Metode kualitatif deskriptif.
---	--	---	--------------------	---	-------------------------------------

Perpustakaan perguruan tinggi didirikan guna mendorong civitas akademik dan berkontribusi dalam rangka mendorong upaya Tri Dharma pada penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat (Irfan & Fitriasi, 2018). Berikut ini adalah uraian rinci penelitian terkait kebijakan informasi yang ada di perpustakaan perguruan tinggi.

Kurniawan dalam artikelnya yang berjudul “Kebijakan pengembangan koleksi e-resources di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” menjelaskan mengenai pentingnya sumber daya elektronik di tingkat universitas, menunjukkan percepatan pertumbuhan dari sumber daya elektronik yang menimbulkan dampak yang signifikan dalam hal pelestarian, penyimpanan, dan pemanfaatan informasi terhadap komunitas akademik. Metode sumber daya elektronik melalui langganan berkala: pemustaka dapat mengakses konten digital melalui langganan berkala *e-resources*. Hal ini perlu diperhatikan agar perpustakaan dapat melakukan pengembangan *e-resources* sesuai dengan keterampilan, kebutuhan, dan visinya. Pengelola perpustakaan juga menghadapi masalah dalam pengadaan dan pengembangan sumber daya elektronik terkait kebijaksanaan akses *e-resources*. Perpustakaan perguruan tinggi menghadapi masalah terkait akses publik ke *e-resources* yang mencakup naskah lengkap tugas civitas akademika, seperti disertasi, tesis, dan skripsi juga peran dan wewenang publik perpustakaan sering tidak jelas (Syafii dkk., 2021)

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya elektronik ada terdapat kendala bagi perpustakaan, dan sangat penting bagi perpustakaan untuk memfasilitasi juga mengembangkan akses ke *e-resources* di jaman serba digital ini. Pengelola perpustakaan tentu terus menghadapi perkembangan teknologi dan informasi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Perguruan tinggi di Indonesia telah menetapkan kebijakan pengembangan koleksi sumber daya elektronik setiap tahun, tetapi pengadaan dan proses seleksi masih terbatas. Biaya langganan dan pembelian adalah biaya yang harus dibayar secara bertahap. Minimal, pemustaka harus terbiasa dengan dan menggunakan sumber daya elektronik. Karena perpustakaan selalu menghadapi masalah dan pemustaka harus membantu apabila terjadi masalah akses, pengelola perpustakaan juga menghadapi masalah terkait kebijakan akses e-sumber saat pengadaan dan pengembangan sumber elektronik. Perpustakaan perguruan tinggi menghadapi masalah terkait akses publik ke sumber daya elektronik yang mencakup naskah lengkap tugas akhir mahasiswa, seperti disertasi, tesis, dan skripsi. Peran dan wewenang publik di perpustakaan sering tidak jelas. Hal ini membuat mahasiswa merasa bahwa pemustaka memiliki jumlah sumber daya elektronik yang terbatas.

Desy Setiyawati dalam penelitiannya yang mempunyai judul “Implimentasi kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Gombong”

menginformasikan bahwa koleksi perpustakaan adalah komponen penting yang digunakan untuk menentukan tingkat pemanfaatannya. Perpustakaan harus mempersiapkan pengembangan koleksinya dengan membuat dan menerapkan kebijakan pengembangan koleksi dalam pengelolaan perpustakaan agar koleksinya dapat dimanfaatkan dan digunakan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan terkait telah menerapkan kebijakan pengembangan koleksi, termasuk akuisisi, penyiangan, seleksi, dan evaluasi. Sementara koleksinya berisi koleksi: non cetak dan cetak. Melalui sumbangan atau hibah, hadiah, langganan, dan pembelian koleksi dapat diperoleh. Hambatan yang ditemui ialah masukan pengguna perpustakaan tidak memenuhi syarat untuk koleksi yang direncanakan, tidak ada standar yang jelas tentang bagaimana membandingkan jumlah koleksi dari segi Bahasa dan bentuk, dan tidak ada yang mengatur jika pengembangan koleksi di hari-hari selanjutnya diperlukan (Setiyawati, 2021).

Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan pengembangan koleksi sudah ada di perpustakaan terkait saat ini. Kebijakan ini mengatur ruang lingkup koleksi, penyiangan, dan pengembangan koleksi cetak dan tidak (non) sesuai dengan tujuan dan visi perpustakaan. Kebijakan ini disesuaikan dengan program studi koleksi cetak dan non cetak di perpustakaan terkait. Sebelum pengadaan koleksi dimulai, dengan beberapa alat bantu seleksi perpustakaan melakukan seleksi terlebih dahulu. Koleksi dapat diperoleh melalui sumbangan, hibah, hadiah, langganan, dan pembelian. Perpustakaan terkait sudah rutin mengembangkan koleksinya. Meskipun demikian, ada beberapa hambatan yang muncul selama kegiatan dilakukan, yaitu masukan pengguna perpustakaan dalam hal ini pemustaka tidak mencukupi angka yang didambakan, tidak tersedianya koleksi yang dipesan di distributor atau penerbit, belum ada standar yang jelas tentang jenis koleksi yang harus ada, baik non cetak maupun cetak, koleksi bahasa inggris tidak dibandingkan satu sama lain, dan tidak ada kebijakan yang jelas yang mengatur pengadaan koleksi jika diperlukan. Dalam kaitannya dengan teori kebijakan pengembangan koleksi, hal ini bisa menjadi kendala selama kegiatan seleksi dilakukan, yang dapat mengganggu proses pengembangan koleksi.

Ach Nizam Rifqi dan Verry Mardiyanto dalam artikelnya yang mempunyai judul "Implementasi kebijakan dan proses pengembangan koleksi digital Perpustakaan Perguruan Tinggi Vokasi (Studi Kasus Perpustakaan Politeknik Negeri Malang)" membahas penerapan kebijakan dan proses pengembangan koleksi digital di perpustakaan terkait. Penelitian Nizam dan Verry didasarkan pada penerapan kebijakan dan prosedur pengembangan komprehensif untuk koleksi digital perpustakaan, menggunakan pendekatan kualitatif terhadap semua kegiatan dilakukan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan koleksi digital perpustakaan terkait disubtansikan 4 kategori, Sebagai contoh, kebijakan yang terkait dengan pengaturan subdisiplin ilmu dalam koleksi yang telah dikembangkan, kebijakan terkait struktur tim pengembangan koleksi, kebijakan mengenai periode waktu pelaksanaan, serta kebijakan terkait dengan sumber yang diperoleh dari koleksi digital. Hasil tambahan tentang pengembangan koleksi digital perpustakaan terkait disubtansikan 5 tahap, yaitu analisis kebutuhan pengguna, kebijakan pemilihan, akuisisi dan pengadaan, penyiangan, dan evaluasi koleksi. Hasil mengenai diskusi sebelumnya, perpustakaan terkait telah mempunyai kebijakan guna memulai proses pengembangan koleksi digital, dengan demikian semua siswa dan karyawan perpustakaan bisa mengakses hasil koleksi digital (Rifqi & Mardiyanto, 2020).

Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat dikatakan bahwa perpustakaan harus melaksanakan kebijakan dan prosedur pengembangan koleksi digital. Dalam surat keputusan yang ditandatangani rector dan pembantu rector yaitu wakil (aturan hukum

perguruan tinggi), mengatur kebijakan internal perpustakaan dalam kegiatan ini. Dengan menerapkan kebijakan ini, perpustakaan dapat meningkatkan kualitas layanannya dan memungkinkan penggunaannya memanfaatkannya dengan sesuai aturan dan benar. Dalam hal akreditasi, perpustakaan bisa memperbaiki kualitasnya. Kebijakan ini bertujuan guna membuat perpustakaan terkait sesuai dengan subdisiplin ilmu yang telah diputuskan. Kebijakan lain memungkinkan tim perpustakaan bekerja sama guna mengembangkan repositori digital. Ditambah lagi, perpustakaan terkait mengatur kebijakan perolehan sumber digital dan kebijakan waktu atau periode. Kelima tahap pengembangan koleksi digital dijelaskan di akhir artikel ini. Dalam proses pengembangan koleksi digital, gagasan Evans disesuaikan dengan situasi nyata. Proses ini dilakukan, dan hasilnya sangat signifikan jika kelima proses tersebut dijadikan pedoman dan dilaksanakan. Selain itu, tim perpustakaan harus mematuhi proses tersebut. Jika kebijakan dan proses pengembangan koleksi digital diterapkan dengan cara konsisten dan terus menerus, perpustakaan Malang akan menjadi organisasi yang unggul di era teknologi informasi. Selain itu, di era informasi saat ini, kebutuhan akan koleksi digital terus meningkat. Dengan demikian, pengguna dapat membuka koleksi digital dengan satu sentuhan dan memenuhi kebutuhan informasinya.

Dian Maisaroh dalam artikelnya yang berjudul “Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan pada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci”, berdasarkan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa Perpustakaan IAIN Kerinci hanya melaksanakan beberapa tahap saja, seperti penyiangan, evaluasi, dan belum melakukan semua enam tahap proses pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi, pemilihan bahan pustaka, dan pengadaan buku adalah beberapa tahap yang belum dilakukan (Maisaroh, 2022).

Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat dikatakan bahwa proses pengembangan koleksi terdiri dari enam tahap: analisis masyarakat pengguna, peraturan pengembangan koleksi, pengadaan bahan pustaka, penyiangan bahan pustaka, dan evaluasi bahan pustaka. Perpustakaan terkait belum menyelesaikan semua enam tahap proses pengembangan koleksi. Beberapa tahap belum dilakukan, seperti evaluasi dan penyiangan. Untuk tahap analisis masyarakat pengguna, Perpustakaan terkait telah menyelesaikan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi bahan pustaka, dan pengadaan bahan pustaka. Selanjutnya, diketahui bahwa koleksi Perpustakaan terkait hanya berupa koleksi cetak. Kendala dalam proses pengembangan koleksi termasuk masalah anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja.

Misteriani Maria Jawa Koten dan Putut Suharso dalam artikelnya yang berjudul “Upaya pengembangan koleksi *grey literature* di Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro”, temuan menunjukkan seperti apa perpustakaan terkait mengembangkan koleksi buku abu-abu atau *Grey Literature*. Penemuan menunjukkan bahwa proses pengadaan, seleksi, dan penyiangan adalah bagian dari proses pengembangan koleksi abu-abu. Pengadaan koleksi literatur abu-abu didanai oleh sumbangan dosen dan tugas akhir mahasiswa. Memilih koleksi yang memenuhi syarat dengan persyaratan perpustakaan disebut sebagai seleksi. Koleksi yang berusia lebih dari 5 tahun dan rusak diambil guna dilakukan penyiangan (Koten & Suharso, 2021).

Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat dikatakan bahwa temuan menunjukkan bahwa Perpustakaan Fakultas Psikologi Undip telah melakukan langkah-langkah berikut untuk meningkatkan koleksi buku hitamnya:

- a. Menganalisis kebutuhan pengguna untuk koleksi buku abu-abu perpustakaan Fakultas Psikologi Undip, perpustakaan tidak menganggap undip sebagai kegiatan yang diwajibkan. Mereka hanya memperhatikan permintaan pengguna untuk koleksi literatur gelap, seperti skripsi yang sangat diperlukan sebagai referensi dalam tugas akhir.

- b. Tidak ada peraturan resmi dan tertulis yang menjadi acuan dalam pengembangan koleksi, termasuk literatur abu-abu (*grey literature*), di perpustakaan terkait. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku digunakan sebagai pedoman.
- c. Perpustakaan terkait hanya akan menyetujui literatur grey yang memenuhi standar perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Psikologi menerima disertasi, tesis, dan skripsi yang sah dengan ditandatangani dan disetujui oleh dosen pembimbing. Perpustakaan terkait menerima karya yang sudah dibahas dalam seminar dan publikasi ilmiah nasional dan internasional.
- d. Dana yang digunakan untuk membeli koleksi buku abu-abu di perpustakaan terkait berasal dari hadiah dan sumbangan dari dosen yang sudah melaksanakan kursus S3 dan S2 di universitas lain dan tugas akhir mahasiswa.
- e. Penyiangan koleksi literatur abu-abu di perpustakaan terkait, ini berarti koleksi literatur abu-abu yang rusak ditarik untuk diperbaiki dan skripsi yang sudah lebih dari 5 tahun ditarik untuk disimpan ke gudang.
- f. Belum ada evaluasi yang dilakukan mengenai upaya pengembangan untuk mengumpulkan literatur abu-abu di perpustakaan terkait.

Berdasarkan kelima artikel yang sudah dipaparkan, diantara lima artikel tersebut terdapat kemiripan mengenai hambatan yang dihadapi terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan koleksi diantaranya yaitu masalah anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja. Perpustakaan perguruan tinggi menghadapi kendala terkait akses publik ke *e-resources*, sedangkan dalam hal pengelolaan pustakawan menghadapi kendala dalam pengadaan dan pengembangan sumber daya elektronik mengenai kebijakan akses *e-resources*. Kendala lain yang dihadapi ialah usulan pemustaka tidak sesuai atau memenuhi kebutuhan koleksi yang direncanakan, tidak adanya aturan, dan standar yang jelas terkait pengembangan koleksi. Pentingnya kontekstualisasi terletak pada upaya untuk memastikan bahwa kebijakan pengembangan koleksi yang diterapkan oleh fakultas selalu memperhatikan prinsip dasar kebutuhan pengguna. Kesuksesan kontekstualisasi ini akan mencapai tingkat optimal apabila terdapat keselarasan pemahaman di antara para pemangku kebijakan, baik di tingkat perpustakaan maupun di instansi induk perpustakaan.

PENUTUP (SIMPULAN DAN SARAN)

Implementasi pengembangan koleksi mengalami kendala, yang sering atau umum terjadi yaitu mengenai masalah anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja. Perpustakaan belum memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan perpustakaan. Akibatnya, tidak mungkin untuk kontekstualisasi kebijakan pengembangan koleksi. Selain itu, peneliti mendapatkan bahwa partisipasi pemakai dalam kebijakan pengembangan koleksi masih rendah. Namun, guna mencukupi persyaratan data pengguna yang benar, keharusan pustakawan untuk mengetahui apa yang sangat mereka butuhkan. Memiliki kebijakan pengembangan koleksi yang baik bisa membantu pustakawan menjadi lebih puas dengan pengalaman pengguna. Selain itu, ditemukan bahwa meskipun perpustakaan tidak mempunyai kebijakan pengembangan koleksi tertulis, mereka telah mempunyai pedoman yang terikat yang berasal dari perjalanan sekian lama yang tidak tertulis. Dengan demikian, pustakawan dituntut aktif dalam melaksanakan sesuatu, dan bisa membangun relasi yang tepat terhadap beberapa pihak yang memiliki pengaruh di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Q. N. (2021). Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan: Formulasi,

-
- Implementasi Hingga Evaluasi. *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 13(2), 101–113. <https://doi.org/10.37108/shaut.v13i2.492>
- Ardyawin, I. (2020). Urgensi Pengembangan Koleksi Sebagai Upaya Menyediakan Koleksi yang Berkualitas di Perpustakaan. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 86. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6779>
- Grataridarga, N. (2019). Analysis of User Needs for Collection Development Activity in Mahkamah Agung Republik Indonesia Library. *Record and Library Journal*, 4(1), 22. <https://doi.org/10.20473/rlj.V4-I1.2018.22-31>
- Gunawan, A. (2017). Pengembangan Koleksi Pada Perpustakaan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perikanan. *Jurnal Pari*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.15578/jp.v2i1.3247>
- Irfan, A., & Fitriasi, S. (2018). *Peranan Perpustakaan Dalam Menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi*. 3(2).
- Koten, M. M. J., & Suharso, P. (2021). Upaya Pengembangan Koleksi Grey Literature di Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 5(4), 579–590. <https://doi.org/10.14710/anuva.5.4.579-590>
- Maisaroh, D. (2022). *Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci*. 6(2).
- Nihayati, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi (Tinjauan Literature Review). *Pustakaloka*, 13(1), 40–58. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v13i1.2660>
- Putri, J. A., & Gani, F. (2022). *Implementasi Kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia dalam Pengembangan Koleksi Elektronik*. 24.
- Rahmah, E. (2014). *Pengembangan Koleksi Perpustakaan Di Kantor Arsip Perpustakaan Dan Dokumentasi Kota Padang*. 3(1).
- Ridwan, M., Am, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rifqi, Ach. N., & Mardiyanto, V. (2020). Implementasi Kebijakan dan Proses Pengembangan Koleksi Digital Perpustakaan Perguruan Tinggi Vokasi (Studi Kasus Perpustakaan Politeknik Negeri Malang). *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 4(2), 159. <https://doi.org/10.29240/tik.v4i2.1896>
- Setiyawati, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi Di Perpustakaan STIKES Muhammadiyah Gombong. *Al-Ma mun Jurnal Kajian Kepustakawanan dan Informasi*, 2(1), 17–27. <https://doi.org/10.24090/jkki.v2i1.4466>
- Syafii, A., Machali, I., & Setyo Putro, N. H. P. (2021). Pengadaan koleksi electronic resources di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 9(2), 129. <https://doi.org/10.24198/jkip.v9i2.30649>
- Yulinar. (2019). Pengembangan Koleksi Perpustakaan Kajian Teoritis Atas Kebijakan, Peluang dan Tantangan di Era Informasi. *MAKTABATUNA : Jurnal Kajian Kepustakawanan*, 1.